

STRATEGI PENANGANAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Oleh :

Wulandari Asril, Thalita Rifda Khaerani

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Semarang City is the capital of Central Java province that not separated from social issues, for example is the problem of street children. In order to handle the problem of street Children in Semarang city, Social Department of Youth and Sports commit various activities to prevent and control the number of street children. Handling problem of street children by the Social Department of Youth and Sports in Semarang City done by field with social welfare problems. The focus and goals in this study is to formulate the strategy to handling the problem of street children that happen in Semarang City. This study is using qualitative descriptive through interviews, literature, and document, and also SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) that used for analyze. The results obtained that handling problem of street Children by the Social Department of Youth and Sports in Semarang city is not maximized. Where there still an obstacles such as deficiency of human resources, minimum budget, insufficient infrastructure, the habit of society that hard to be change and the absence of regulation of mayor. By analyzing the internal environment and the external environment we can got the strategies that will test by litmus test to determine the level of strategical from these issues. Based on these results, It is recommended for the strategic issues that has formulated can help Social Service of Youth and Sports of Semarang city for handling the problem of street children. This is done to improve the handling of children street problem in Semarang City.

Key Word : Strategy, Infrastructure, Employee, Litmus test, Street Children

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun. Tiga tahun terakhir jumlah penduduk Indonesia yaitu pada tahun 2012 sebanyak 246,9 juta jiwa, pada tahun 2013 sebanyak 249,9 juta jiwa,

tahun 2014 sebanyak 252,4 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,2% (<http://bps.go.id>). Akan tetapi, peningkatan jumlah penduduk di Indonesia tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan perekonomian bangsa. Seiring dengan perkembangan globalisasi, timbul permasalahan sosial yang terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia, salah satu di antaranya yaitu masalah kemiskinan.

Kemiskinan dan anak jalanan sangat erat kaitannya dan saling berhubungan, karena kemiskinanlah yang menyebabkan anak jalanan ada di kota-kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Permasalahan kemiskinan dan anak jalanan yang menjadi masalah sosial di Indonesia merupakan masalah yang harus di tangani oleh pemerintah karena sesuai dengan amanat UUD tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, termasuk anak jalanan”. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (konvensi tentang hak-hak anak).

Anak jalanan pada umumnya berada pada usia produktif dan usia sekolah. Mereka mempunyai kesempatan yang sama seperti anak-anak lainnya. Anak jalanan merupakan warga negara yang berhak memperoleh pelayanan pendidikan, tetapi disisi lain mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan mencari nafkah dijalan. Keberadaan anak jalanan tidak hanya terbatas pada kota-kota besar utama seperti Jakarta atau Surabaya, akan tetapi sudah menyebar ke berbagai kota lainnya. Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang juga merupakan salah satu kota besar di Indonesia memiliki permasalahan yang

serius tentang tuna sosial dalam hal ini adalah anak jalanan.

Berikut ini beberapa perbandingan jumlah anak jalanan di beberapa Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 1.1
Jumlah Anak Jalanan di Berbagai Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2000-2015

No.	Nama Kota/Kabupaten	Jumlah Anak Jalanan
1.	Kabupaten Brebes	260
2.	Kabupaten Kudus	286
3.	Kabupaten Blora	90
4.	Kabupaten Banyumas	70
5.	Kabupaten Batang	125
6.	Kabupaten Rembang	25
7.	Kabupaten Magelang	72
8.	Kabupaten Pemalang	120
9.	Kabupaten Kebumen	299
10.	Kota Semarang	400
11.	Kota Magelang	116
12.	Kota Pekalongan	200
13.	Kota Tegal	333
14.	Kota Surakarta	103

Sumber : Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah anak jalanan dari berbagai kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat bahwa jumlah anak jalanan yang paling banyak terdapat di Kota Semarang. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pengambilan penelitian ini di lakukan di Kota Semarang.

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang selaku Organisasi Publik yang memiliki wewenang dalam mengatasi masalah anak jalanan dan penanggulangan anak jalanan berkewajiban untuk melakukan penanganan masalah anak jalanan sesuai dengan amanat UUD 1945 supaya mereka bisa memperoleh haknya dan benar-benar dilindungi oleh negara. Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang yaitu, visinya “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Kepemudaan, dan Keolahragaan yang Berdaya Saing”. Program upaya penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinsospora, khususnya Bagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai dengan Visi Dinsospora yang menyangkut Bidang PMKS yaitu Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Program yang berhubungan dengan permasalahan anak jalanan yang ditangani oleh Bidang PMKS yaitu Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar, Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar, Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dalam menangani masalah anak jalanan ini masih banyak memiliki kendala di berbagai hal. Contohnya banyak anak jalanan yang sulit untuk dijangkau atau mau untuk dibina di Rumah Singgah Sosial Anak karena anak jalanan telah terbiasa hidup bebas dan sulit untuk menerima aturan yang ada di RSPA. Mengatasi masalah anak jalanan ini diperlukan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang

dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak dan Masyarakat. Tujuannya agar upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinsospora juga mendapat dukungan dari lingkungan sekitar.

B. TUJUAN

Tujuan penelitian penanganan anak jalanan di Kota Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang adalah :

1. Menganalisis strategi penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Disospora Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat strategi penanganan anak jalanan yang dilakukan Disospora Kota Semarang.
3. Merumuskan strategi penanganan anak jalanan yang sebaiknya dilakukan oleh Disospora Kota Semarang.

C. TEORI

1. Administrasi Publik

Istilah Administrasi Publik (*administration of public*) memperlihatkan bagaimana peran pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil keputusan dan prakarsa, penting atau baik menurut mereka untuk masyarakat karena masyarakat diasumsikan sebagai pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah. (Keban, 2014: 4)

Selanjutnya, istilah administrasi publik merupakan konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah lebih mengarah kepada

“*empowerment*” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi agar masyarakat mampu mengatur hidupnya tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Dengan dilakukannya hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pelaksanaan dan penilaian hasil, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator, dan dapat memfokuskan diri pada urusan-urusan negara yang bersifat strategis. (Keban, 2014: 4-5)

Sedangkan Henry, dalam Keban (2014: 6) administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat. Definisi ini melihat administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi administrasi publik diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan publik berdasarkan pertimbangan saran dari masyarakat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen agar kebijakan yang dihasilkan efektif, efisien bagi masyarakat.

2. Manajemen

Manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana

individu, bekerja sama dalam kelompok, tujuan efisien mencapai dipilih, Koontz. (Wijudjeng, 2007:2).

Lebih lanjut James AF Stoner (Wijudjeng, 2007:3) menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan efek anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi.

Unsur-unsur manajemen

a. *Man* (Manusia, Tenaga Kerja)

Didalam kegiatan manajemen faktor manusia adalah yang paling menentukan. Titik pusat dari manajemen adalah manusia, sebab manusia membuat tujuan dan dialah yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya itu. Tanpa tenaga kerja tidak akan ada proses kerja.

b. *Money* (Uang, Anggaran)

Dalam dunia modern uang merupakan faktor yang penting sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai suatu usaha. Suatu perusahaan yang besar diukur pula dari jumlah uang berputar pada perusahaan itu. Uang diperlukan pada setiap kegiatan manusia untuk mencapai tujuannya.

c. *Machines* (Mesin, Alat)

Mesin dapat meringankan dan memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan. Hanya yang perlu diingat bahwa penggunaan mesin sangat tergantung pada manusia, bukan manusia yang tergantung atau bahkan diperbudak oleh mesin.

d. *Methods* (Metode, Cara)

Metode ini diperlukan dalam setiap kegiatan manajemen yaitu dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dengan cara kerja yang

baik akan memperlancar dan memudahkan pelaksanaan pekerjaan.

e. *Materials* (Bahan, Perlengkapan) Manusia tanpa material atau bahan-bahan tidak akan dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya, sehingga unsur material dalam manajemen tidak dapat diabaikan.

f. *Markets* (Pasar)

Adapun dalam administrasi Negara, yang menjadi pasar adalah masyarakat (publik) secara keseluruhan, sedangkan yang menjadi produknya adalah berupa pelayanan dan jasa (service). Apabila rakyat atau masyarakat telah merasakan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintahnya maka rakyat akan pula memberikan kerjasama dengan sebaik-baiknya atau dengan perkataan lain mendukungnya sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan stabil.

3. Manajemen Strategis

Nawawi (2003: 148-149) menginventaris 4 (empat) definisi mengenai manajemen strategis yaitu :

- a. Manajemen strategis sebagai proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.
- b. Manajemen strategi sebagai usaha menejerial menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan.
- c. Manajemen strategi sebagai arus keputusan dan tindakan yang

mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi.

- d. Manajemen strategi sebagai perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategis) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut VISI), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut MISI), dalam usaha menghasilkan sesuatu (Perencanaan Operasional untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa seperti pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian sasaran (Tujuan Operasional) organisasi.

Menggunakan manajemen strategi juga harus memperhatikan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) eksternal, dan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) internal atau di kernal juga dengan SWOT (David, 2009: 17). Menganalisis peluang dan ancaman ini diperlukan untuk merumuskan berbagai strategi yang diperlukan untuk mengambil keuntungan dari peluang eksternal dan menghindari atau meminimalkan dampak ancaman eksternal.

Kekuatan dan kelemahan internal merupakan aktivitas terkontrol suatu organisasi yang mampu dijalankan dengan sangat baik atau buruk. Mengidentifikasi serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam wilayah fungsional suatu organisasi merupakan sebuah aktivitas manajemen strategis yang esensial. Organisasi berjuang untuk menjalankan strategi yang mampu

menggandakan kekuatan internal sekaligus meniadakan kelemahan internal.

Setelah tahapan analisis *SWOT* tentu akan dihasilkan berbagai isu atau perumusan yang didapat. Selanjutnya yang perlu dilalui adalah penentuan isu-isu mana yang akan menjadi prioritas. Dalam menentukan ukuran tentang bagaimana strategisnya suatu isu dengan menggunakan tes litmus. Tes litmus digunakan untuk menyaring isu-isu strategis. Isu yang benar-benar strategis adalah isu yang memiliki skor tinggi pada semua dimensi, sedangkan isu operasional adalah isu dengan skor rendah dalam semua dimensi.

Dari hasil skoring identifikasi isu strategis di atas, selanjutnya dibuat skoring untuk memprioritaskan isu-isu yang bersifat strategis dengan rumusan sebagai berikut:

1. Isu yang bersifat Operasional: 1-13
2. Isu yang bersifat Moderat : 14-26
3. Isu yang bersifat Strategis : 27-39

D. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Untuk mendapatkan informan yang tepat dan sesuai tujuan, dalam memilih informan digunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumen, dan studi pustaka.

PEMBAHASAN

1. Strategi Penanganan Anak Jalanan di Disospora Kota Semarang

Didalam penanganan masalah anak jalanan yang ada di Kota Semarang, Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang melakukan strategi penanganan secara preventif dan represif. Penanggulangan preventif tujuannya untuk mencegah anak bekerja dan turun kejalanan dengan tujuan mencari uang dan

penanggulangan represif untuk menanggulangi permasalahan anak jalanan yang sudah terlanjur bekerja dan hidup dijalanan. Beberapa program atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan jumlah anak jalanan yaitu kegiatan yang dilakukan berdasarkan Perda dan Renstra Disospora tahun 2010-2015 yaitu sosialisasi, penjangkaran atau razia, pembinaan dan pelatihan, serta pemberian bantuan kepada anak jalanan dan orang tua anak jalanan di Kota Semarang. Tujuan dari program atau kegiatan yang dilakukan agar bisa mengendalikan dan mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Semarang, selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak ada lagi anak-anak yang turun kejalanan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya maupun diri sendiri.

2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Sebelum menentukan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam penanganan anak jalanan, terlebih dahulu dilakukan analisis lingkungan strategis. Analisis ini diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang (lingkungan internal), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman (lingkungan eksternal). Berdasarkan analisis lingkungan strategis dapat di rumuskan faktor-faktor pendorong yang berasal dari kekuatan dan kelemahan serta merumuskan faktor-faktor penghambat yang berasal dari kelemahan dan ancaman.

a. Lingkungan internal

1. Kekuatan

- a) kesesuaian visi dan misi dengan kondisi masyarakat

Berdasarkan visi dan misi yang dilaksanakan oleh Dinas

Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang sudah cukup jelas bahwa Disospora berusaha menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini menangani permasalahan anak jalanan di Kota Semarang yang sesuai dengan tuntutan dan kondisi masyarakat.

b) kualitas sumber daya manusia yang memadai

Secara kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang sudah cukup mempunyai. Tetapi tetap harus ditingkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki agar bisa menunjang dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada.

c) kondisi sarana dan prasarana yang baik

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan seperti mobil patroli dan panti/Rumah Perlindungan Sosial Anak kondisinya masih dalam keadaan baik dan terawat dan masih layak digunakan kegiatan patroli dan kegiatan pembinaan dan pelatihan.

d) Komitmen *stakeholders*

Didalam penanggulangan masalah anak jalanan Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah, pihak swasta dalam hal ini LSM dan panti serta masyarakat.

2. Kelemahan

a) Kuantitas sumber daya manusia yang tidak mencukupi

Sumber daya manusia yang di miliki secara kuantitas masih belum memadai. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan kesejahteraan sosial yang harus diatasi oleh Bidang PMKS yaitu sebanyak 26 permasalahan sosial. Sedangkan jumlah pegawai yang ada hanya 11 orang dan harus menangani seluruh permasalahan sosial yang di bebaskan ke bidang PMKS.

b) Anggaran yang minim

Banyaknya program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam mengatasi permasalahan anak jalanan belum memadai dengan anggaran yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kota Semarang.

c) sarana dan prasarana tidak memadai

Tidak adanya mobil patroli dan panti rehabilitasi kusus penanganan anak jalanan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dapat menghambat dalam melakukan program dan kegiatan penanganan masalah anak jalanan.

b. Lingkungan Eksternal

1. Peluang

a) kondisi politik yang stabil

Situasi politik yang terjadi di Kota Semarang saat ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan masalah anak jalanan di Kota

Semarang, dengan kata lain tidak ada pengaruh secara langsung yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pimpinan dalam penanganan anak jalanan melihat situasi politik yang sedang berkembang saat ini.

b) Partisipasi masyarakat yang cukup baik

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah anak jalanan. Keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah anak jalanan dapat dilihat dengan adanya panti-panti atau Rumah Perlindungan Sosial Anak yang didirikan berdasarkan inisiatif masyarakat dan dikelola secara swadaya.

c) kerja sama dengan pihak lain

Kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan anak jalanan tidak hanya dengan instansi pemerintahan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Satpol PP tetapi juga dengan masyarakat. Adanya kerja sama dengan pihak lain diharapkan dapat menunjang pelaksanaan program penanganan anak jalanan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

d) adanya perda tentang penanganan anak jalanan

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dalam mengatasi masalah anak jalanan mengacu pada Perda No. 5

Tahun 2014. Dengan adanya Perda sebagai landasan hukum akan memberikan kedudukan yang kuat bagi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan anak jalanan di Kota Semarang.

2. **Ancaman**

a) kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah

Kebiasaan masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan membuat Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang sulit untuk mengendalikan jumlah anak jalanan karena banyaknya anak jalanan yang merasa “keenakan” bekerja dijalanan untuk mendapatkan uang karena banyaknya masyarakat yang merasa kasihan dan memberikan uang ke anak jalanan.

b) perekonomian masyarakat yang tidak stabil

Banyaknya orang tua atau keluarga yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup mengharuskan anak untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan keluarganya dengan cara bekerja dijalanan.

c) belum adanya Perwal

Peraturan Walikota merupakan petunjuk teknis dari pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan dalam mengatasi permasalahan anak jalanan. Dengan belum adanya Perwal kondisi ini menjadi halangan bagi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam mengatasi

permasalahan anak jalanan di Kota Semarang.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis yang dilakukan dapat disimpulkan :

a. faktor pendorong

- 1) kesesuaian visi dan misi dengan kondisi masyarakat
- 2) kualitas sumber daya manusia yang memadai
- 3) kondisi sarana dan prasarana yang baik
- 4) komitmen *stakeholders*
- 5) kondisi politik yang stabil
- 6) partisipasi masyarakat yang cukup baik
- 7) kerja sama dengan pihak lain
- 8) adanya perda yang mengatur tentang permasalahan anak jalanan

b. faktor penghambat

- 1) kuantitas sumber daya manusia yang tidak mencukupi
- 2) anggaran yang minim
- 3) sarana dan prasarana yang tidak memadai
- 4) kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah
- 5) perekonomian masyarakat yang tidak stabil
- 6) belum adanya Perwal

3. Identifikasi Isu-Isu strategis

Penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Disospora Kota Semarang dengan memperhatikan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan matriks SWOT ditentukan isu-isu strategis yang dihasilkan berdasarkan lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya, dan isu strategis yang dihasilkan yaitu :

- a. Peningkatan penanganan masalah anak jalanan dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat (S-O)

- b. Peningkatan penanganan masalah anak jalanan melalui komitmen *stakeholders* dengan dukungan perda yang ada (S-O)
- c. Peningkatan kerja sama untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana yang tidak memadai (W-O)
- d. Penambahan jumlah personel SDM di Disospora dalam penanganan anak jalanan yang mengacu pada program yang diatur di dalam Perda (W-O)
- e. Peningkatan anggaran dalam penanganan anak jalanan (W-O)
- f. Mengoptimalkan sosialisasi pelarangan memberi uang kepada anak jalanan dengan dukungan dan komitmen *stakeholders* (S-T)
- g. Segera disahkannya Perwal sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan Perda agar tidak menghambat dalam penanganan anak jalanan (W-T)

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai strategi penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa :

1. Strategi Penanganan Anak Jalanan di Disospora Kota Semarang

Penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Disospora melalui dua cara yaitu penanganan secara preventif dan penanganan secara represif. Penanganan secara preventif kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi dan pemberian bantuan kepada orang tua anak jalanan. Penanganan secara represif yang dilakukan yaitu razia atau penjarangan, pemberian bantuan bagi anak jalanan serta pembinaan dan pelatihan.

2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Penanganan Anak Jalanan

Faktor pendorong dan penghambat dalam penanganan anak jalanan dilihat dari faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman Disospora Kota Semarang. Faktor pendorongnya yaitu : kesesuaian Visi dan misi dengan kondisi masyarakat, kualitas Sumber daya manusia yang memadai, kondisi sarana dan prasarana yang baik, komitmen *stakeholders*, kondisi politik yang stabil, partisipasi masyarakat yang cukup baik, kerja sama dengan pihak lain, adanya Perda yang mengatur tentang permasalahan anak jalanan. Sedangkan faktor penghambat dalam penanganan anak jalanan yaitu kuantitas Sumber daya manusia yang tidak mencukupi, anggaran dana yang minim, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah, perekonomian masyarakat yang tidak stabil, belum adanya Perwal sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda.

3. Strategi Penanganan Anak Jalanan yang Sebaiknya Dilakukan Disospora

Berdasarkan analisis faktor pendorong dan faktor penghambat yang dilakukan, maka diperoleh isu-isu strategis. Isu strategis yang dirumuskan yaitu Peningkatan penanganan masalah anak jalanan dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat (S-O), Peningkatan penanganan masalah anak jalanan melalui komitmen *stakeholders* dengan dukungan perda yang ada (S-O), Peningkatan kerja sama untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana yang tidak memadai (W-O), Penambahan jumlah personel SDM di Disospora dalam penanganan anak jalanan yang mengacu pada program yang diatur

di dalam Perda (W-O), Peningkatan anggaran dalam penanganan anak jalanan (W-O), Mengoptimalkan sosialisasi pelarangan memberi uang kepada anak jalanan dengan dukungan dan komitmen *stakeholders* (S-T), Segera disahkannya Perwal sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan Perda agar tidak menghambat dalam penanganan anak jalanan (W-T).

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, faktor penghambat dan faktor pendorong, serta isu strategis, maka ditemukan sebuah strategi yang sudah diuji menggunakan test litmus. Strategi-strategi tersebut menjadi rekomendasi dalam penanganan masalah anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya. Programn strategis yang dapat dilakukan yaitu:

1. Penambahan sumber daya manusia dengan penambahan pegawai tetap atau penambahan pegawai honorer dalam membantu masalah penanganan masalah kesejahteraan sosial salah satunya masalah anak jalanan. selain itu penambahan personil dalam pendampingan anak jalanan.
2. Peningkatan kerja sama untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana yang tidak memadai. Dibutuhkan peningkatan kerja sama dengan panti-panti sosial atau Rumah Perlindungan Sosial Anak yang peduli tentang permasalahan anak jalanan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Disospora.
3. Peningkatan anggaran dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak swasta atau lembaga yang peduli

- dengan penanganan masalah anak jalanan.
4. Segera disahkannya Perwal sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan agar tidak menghambat Disospora dalam penanganan anak jalanan. Hal ini dilakukan agar penanganan masalah anak jalanan dapat dilakukan dengan lebih maksimal.
 5. Peningkatan penanganan masalah anak jalanan dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan yaitu dengan tidak memberikan uang kepada anak jalanan tujuannya agar jumlah anak jalanan tidak terus bertambah.
 6. Peningkatan penanganan masalah anak jalanan melalui komitmen *stakeholders* dengan dukungan perda yang ada dengan cara kerja sama yang dilakukan dengan SKPD terkait penanganan masalah anak jalanan seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Contohnya kerja sama dengan Dinas Pendidikan akan membantu Disospora mengatasi permasalahan anak jalanan seperti anak jalanan yang putus sekolah bisa difasilitasi dalam mengikuti ujian paket sesuai dengan tingkat pendidikannya.
 7. Mengoptimalkan sosialisasi peraturan memberi uang kepada anak jalanan dengan dukungan dan komitmen *stakeholders*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung. Contohnya dengan memasang baliho atau spanduk dan himbauan disekitar *traffic light* terkait pelarangan pemberian uang, dan juga

meningkatkan sosialisasi peraturan tentang pelarangan pemberian uang kepada anak jalanan dan sanksi yang akan diterima jika tetap memberikan uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, John M. 2004. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- David, R. 2009. *Manajemen Strategis*. Jakarta. Salemba Empat.
- Istianto, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintah dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Keban, Yeremias. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta. Gava Media
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Strategi*. Jakarta. Erlangga
- Moleong, J Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: UGM Press
- Purwanto, Iwan. 2006. *Manajemen Strategi*. Bandung. Yrama Widia.
- Salusu. 2005. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance*. Bandung. Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Strategik*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Sujarweni, V, Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lebih Lengkap, Praktis, dan Mudah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Triton. 2007. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta. Tugu Publisher
- Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Marali, Nurhayati. 2015. J. Penelitian. Universitas Negeri Gorontalo. Vol. 3, No. 1. *Penanganan Masalah Anak Jalanan (Studi Penelitian di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo)*. Dalam <http://kim.ung.ac.id/>. Diunduh pada tanggal 20 Mei 2016 pukul 15.00 WIB.
- Setijanigrum, Erna. 2008. J. Penelit. Din. Sos. Vol. 7, No. 1, April 2008: 16-22. *Jurnal Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya Dalam Menangani Anak Jalanan*. Dalam <http://journal.unair.ac.id/>. Diunduh pada tanggal 25 November 2015 pukul 20.15 WIB.
- Ramadhan, R Rizky. 2014. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomer 2, 2014: 2151-2160. *Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah No. 16 Tahun 2002 Tentang Anak Jalanan Di Kota Samarinda*. Dalam <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/>. Diunduh pada tanggal 25 Mei 2016 pukul 19.00 WIB.
- Jauchar B. 2008. Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008: 153-168. *Pendekatan Pemerintah Kota Dalam Mengatasi Anak Jalanan di Kota Samarinda (Implementasi Perda Samarinda No. 16 tahun 2002)*. Dalam <http://webfisip.fisip.uns.ac.id/>. Diunduh pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 15.00 WIB.
- Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang tahun 2010-2015. <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/15/267394/Perda-Solusi-Penindakan-PGOT>) diakses pada tanggal 14 November 2015 pukul 19. 30 WIB.
- <http://jateng.tribunnews.com/2014/01/08/uang-receh-itu-bikin-anak-jalanan-betah-jadi-peminta> diakses pada tanggal 15 April 2016 pukul 15.00 WIB.
- <http://pantisosialsmg.com/statis-3-visimisi.html> diakses pada tanggal 14 November 2015) pukul 20.00 WIB
- <http://bappeda.semarangkota.go.id> diakses pada tanggal 5 Desember 2016 pukul 19.00 WIB.
- <http://semarangkota.bps.go.id> diakses tanggal 5 Desember 2016 pukul 20.00 WIB
- <http://bps.go.id> diakses pada tanggal 20 November 2015 pukul 20.15 WIB.
- <http://bkkbn.go.id/kependudukan/default.aspx> diakses pada tanggal 20 November 2015 pukul 21.00 WIB.